

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alistair, Clark 2015, *Public Administration and the Integrity of Electoral Process in British Elections*, Public Administration Vol.93, No 1 2015 (86-102).
- Alvarez, R Michael, Hall, Thad E, Hyde, Susan D (ed), 2008, *“Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation”*, The Brookings Institution, Washington.
- Ardiantoro, Juri 2017, *Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017*, dalam Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional, Perludem, Jakarta.
- Catt et al, 2014, *Electoral Management Design*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm.
- Chaniago, Pangi Syarwi, 2016, *Evaluasi Pilkada: Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, Jurnal Politik Indonesia. Indonesia Political Science Review. Hal 196 - 211.
- Dewi, Kurniawati H (ed) 2016. *Pemilukada Asimetris dalam Perspektif NKRI*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Daulai, Gebril 2017, *Riwayat Pemilu Indonesia*, PT Nagakusuma Media Kreatif, Jakarta.
- DKPP 2016, *Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jakarta.
- Fatah, Eef Saefulloh, 1997, *Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru*, dalam *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, MIZAN, Bandung.
- FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), tanpa tahun, *Kebijakan Anggaran: Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien dan Demokratis*, Seknas FITRA, Jakarta, (diunduh 8 Desember 2018).
- Harun, Refly 2006, *Pilkada Langsung dan Rezim Pemilu*, dalam Mubarak, MZ, Susilo, MA, Pribadi, A (eds.), *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.
- Huda, Nimatul, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Nimatul dan Nasef, Imam 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Husein, Harun (ed), 2017, *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.



- Isra, Saldi 2017, *Pemilu dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat*, Themis Publishing, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwo 1982, *Mekanisme Pengontrolan dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Suatu Studi Perbandingan*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwo 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwo 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mozzaffar, Shaheen dan Schedler, Andreas 2002, *The Comparative Study of Electoral Governance-Introduction*, International Political Science Review, Vol. 23, No. 1, 5-27.
- Pamungkas, Sigit 2010, *Pemilu, Perilaku Pemilih & Kepartaian*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.
- Prasojo, Eko 2009, *Pemerintahan Politik Lokal di Jerman dan Perancis*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rizkiyansyah, Ferry K, 2017, *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2014*, Idea Pub, Bandung.
- Saleh, K Wantjik 1981, *Menyongsong Pemilu 1982*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sardini, Nur Hidayat (Ed) 2016, *60 tahun Jimly Asshidiqie: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Soejito, Irawan, 1983, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Solihin, Dadang dan Marhayudi, Putut, 2002, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, Institute for Small and Medium Enterprise Empowerment (ISMEE).
- Subekti, Valina Singka 2015, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: dari Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sujamto 1985, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Small and Medium Enterprise Empowerment (ISMEE), Jakarta.
- Supriyanto, Didik 2007, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho 2015, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.



Thomas, P,G dan Gibson,L,R, 2014 *Comparative Assessment of Central Electoral Agencies : A Report Commissioned by Elections Canada*, Elections Canada.

Wall, Alan et al 2006, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, International IDEA*, Stockholm.

Widardjo, Boedhi, Djafar, Wahyudi, dan Yulianto 2008, *Assessment Transparansi dan Akuntabilitas KPU pada Pelaksanaan Pemilu 2004: Sebuah Refleksi untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Yayasan TIFA, Jakarta, h.47).

Yusa, Farchan et al, 2016, *Problematika Pilkada Langsung : Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Langsung di Provinsi Sumatera Utara 2005-2007*. Jurnal Renaissance Vol.1 No.01, Mei 2016).

Zein, Kurniawan dkk 2014, *Assessmen Partisipatif Pemilu 2014: Pilihan Model Evaluasi Pemilu di Indonesia*. Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Jakarta.

#### Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Pemilu

*European Union Election Observation Mission to Indonesia 2004: Final Report*. 2004. Second Edition.

The Carter Center 2004 *Indonesian Election Report*

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 dalam Angka

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dalam Angka

#### Website

[www.aceproject.org](http://www.aceproject.org)

SITAP KPU 2015 (<https://infopilkada.kpu.go.id/sitap-2015/>)

SITAP KPU 2017 (<https://pilkada2017.kpu.go.id/>)

Dirjen-otda-ada-sejumlah-pemda-berupaya-lemahkan-kpu-dan-bawaslpersonil DPK.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/08/19001601/dirjen-otda-ada-sejumlah-pemda-berupaya-lemahkan-kpu-dan-bawaslpersonil> DPK. Pada Jumat 8 Desember 2018.

#### Undang-Undang dan peraturan lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013.

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 Tentang tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum

PP No 41 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Surat Edaran Sekjen KPU Nomor 106/SJ/I/2014 tentang Pergantian Pejabat Struktural pada Sekretariat KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/Kota

Surat Edaran Sekjen KPU Nomor 188/SJ/II/2015 tgl 13 Feb 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris KPU Provinsi

Keputusan Sekjen KPU Nomor 245/SDM.05.5.Kpts/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016